

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI, HIERARKI NORMA HUKUM, PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	
A. Konstitusi dan Supremasi Konstitusi	22
1. Pengetian Konstitusi	22
2. Supremasi Konstitusi	28

B. Hierarkie Norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia	31
1. Hierarkie Norma Hukum	31
2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia	40
3. Undang-Undang	43
C. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	48
1. Macam-macam Pengujian Peraturan Perundang-undangan ...	48
2. Model-model <i>Constitutional Review</i>	54
3. <i>Constitutional Review</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	59
D. Perjanjian Internasional	68
1. Pengertian Perjanjian Internasional	68
2. Pembentukan Perjanjian Internasional	75
a) Perundingan (<i>Negotiation</i>)	76
b) Penandatanganan (<i>Signature</i>)	78
c) Pengesahan (<i>Ratification</i>)	82
3. Berlakunya Dan Mengikatnya Perjanjian Internasional	88
4. Berakhirnya Perjanjian Internasional	90

**BAB III JUDICIAL PREVIEW SEBAGAI MEKANISME
VERIFIKASI KONSTITUSIONALITAS HASIL
RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**

A. Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	96
1. Pengaturan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia	96
2. Pengesahan Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia	101
3. Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hukum	

Nasional Indonesia	104
B. <i>Judicial Review</i> Terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional	112
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional	112
2. Jalan keluar Pembatalan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi	119
C. Urgensi <i>Judicial Preview</i> Sebagai Mekanisme Verifikasi Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional	125
1. <i>Judicial Preview</i> Terhadap Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional	125
2. Jalan Alternatif Sementara Pengujian Konstitusionalitas Terhadap Perjanjian Internasional	129
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran-saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139